

PENERIMAAN DAERAH SEBAGAI ASPEK PENTING PENENTU BELANJA MODAL PEMERINTAH: STUDI PADA PEMERINTAH BANYUWANGI

Fandi Prasetya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

fandi.prasetya@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to obtain information about whether regional revenue in PAD, DAU, and DAK influences the allocation of capital expenditures. The research method used in this research is quantitative research methods. The data used is secondary data in the form of the Budget Realization Report (LRA) of the Banyuwangi Regency Government for 2011-2018. The data obtained were then analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the determination of capital expenditure did not come from Local Own Revenue (PAD) & DAK. However, DAU influences the amount of capital expenditure. This research is expected to be used as a basis for the Banyuwangi Regency Government to increase its regional revenue sources so that it can be used to finance capital expenditures.

Keywords: PAD; DAU; DAK; Capital Spending

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai apakah Pendapatan Daerah yang berupa PAD, DAU, serta DAK memiliki pengaruh pada alokasi belanja modal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2018. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan besarnya belanja modal tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) & DAK. Namun, DAU memiliki pengaruh pada penentuan besarnya belanja modal. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih meningkatkan sumber penerimaan daerahnya agar dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.

Katakunci: PAD; DAU; DAK; Belanja Modal

Cronicle of Article: Received (Januaru); Revised (March); and Published (June).

©2021 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Fandi Prasetya is from Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Airlangga University, Surabaya, Indonesia. Corresponding Author: fandi.prasetya@feb.unair.ac.id

How to cite this article: Prasetya,F. (2021). Penerimaan Daerah Sebagai Aspek Penting Penentu Belanja Modal Pemerintah: Studi Pemerintah Banyuwangi. Jurnal Kajian Akuntansi, 5(1), 69-85.

PENDAHULUAN

Tahun 1999, Sistem Pemerintah Republik Indonesia mengalami peralihan dari jaman orde baru ke era reformasi. Di era reformasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan desentralisasi. Berbagai kalangan meyakini bahwa dengan adanya desentralisasi maka hal ini merupakan suatu langkah pengelolaan negara dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus aktivitas daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah (Canavire-Bacarreza et al., 2020).

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah pada dasarnya merupakan suatu langkah dalam memberdayakan daerah untuk mengelola pembangunan yang ada didaerahnya (Pan et al., 2020; Zhang et al., 2019). Otonomi daerah merupakan bentuk dari penerapan teori keagenan. Hubungan baik diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi publik. Kemandirian serta inovasi yang dimiliki oleh setiap daerah sangat diperlukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat (Qiao et al., 2019). Tidak hanya memberikan kebebasan dalam pengelolaan pembangunan yang ada didaerahnya namun juga termasuk dalam kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan pelayanan kepada publik (Mabillard & Pasquier, 2015). Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus lebih diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat (Ke et al., 2020) atau publik salah satunya adalah belanja modal (Kasdy et al., 2019). Tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah di dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti pembangunan infrasturktur, pemberian layanan kesehatan (Behera & Dash, 2019; Olanubi & Osode, 2017) dan kepentingan

lainnya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi kewajibannya (Putra & Hidayat, 2016). Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator keuangan daerah (Wang et al., 2019) oleh karena itu beberapa potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan. Realisasi PAD tahun 2014 sebesar Rp283.488.703.181.03, tahun 2015 sebesar Rp346.992.331.406.82, tahun 2016 sebesar Rp367.929.703.427.10, tahun 2017 sebesar Rp388.943.532.860.79, tahun 2018 sebesar Rp446.065.753.574.5. Sedangkan untuk realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan tetapi realisasi belanja modal tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Tahun 2014 realisasi belanja modal di Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp558.546.677.147,73, tahun 2015 sebesar Rp699.415.745.318.72, tahun 2016 sebesar Rp895.576.015.060.43, tahun 2017 sebesar Rp657.077.214.259.81, tahun 2018 sebesar Rp462.844.947.282.3.

Mayoritas pemerintah daerah yang ada di Indonesia masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk mendukung pendanaan pembangunan di daerahnya masing-masing (Putra & Hidayat, 2016). Dengan latar belakang tersebut maka memotivasi peneliti untuk melihat bagaimana pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Seperti yang kita ketahui luas daratan Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.782,5 km dan menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten terluas di Jawa Timur dengan jumlah desa sebanyak 217 desa yang terbagi di 25 kecamatan. Luasnya wilayah dan banyaknya desa di Kabupaten Banyuwangi maka potensi untuk

mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan cukup besar apalagi sektor pariwisata menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Banyuwangi (Zen & Wulandari, 2016). Dengan potensi, luas daratan, dan kondisi geografis dari Kabupaten Banyuwangi maka pemerintah daerah perlu untuk memikirkan peningkatan pelayanan kepada publik dengan peningkatan pengalokasian belanja modal (Kasdy et al., 2019). Pelayanan kepada publik atau masyarakat sangat bergantung dari alokasi belanja modal atau aset tetap yang dialokasikan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat (Baihaqi & Khotimah, 2009). Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://bpkad.banyuwangikab.go.id>, rasio penentuan besaran belanja modal dengan total belanja daerah di Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuatif sejak tahun 2011 hingga tahun 2018. Tahun 2011, rasio yang tercatat sebesar 19,8%, tahun 2012, rasio yang tercatat sebesar 21,1%, tahun 2013 rasio yang tercatat sebesar 22,6%, tahun 2014 rasio yang tercatat sebesar 25,4 %, tahun 2015 rasio yang tercatat sebesar 27,7%, tahun 2016 rasio yang tercatat sebesar 29,2 %, tahun 2017 rasio yang tercatat sebesar 30,9%, dan pada tahun 2018 rasio yang tercatat sebesar 17,9 %. Dari rasio yang tercatat, rasio belanja modal paling kecil terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 17,9 %. Rasio tersebut turun sebesar 13% dari tahun 2017. Penurunan perbandingan antara belanja modal dengan belanja daerah menggambarkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal jumlahnya masih sangat terbatas dari total belanja daerah padahal indikator dari peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berasal dari jumlah alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah et al., (2020) menyimpulkan bahwa belanja daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri (PAD). Penelitian Juniawan & Suryantini, (2018) menyimpulkan dalam

penelitian mereka bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh daerah (PAD) mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal. Hasil yang sama juga disimpulkan dalam penelitian Purbarini & Masdjojo, (2015). Nurlis, (2016) dan Purbarini & Masdjojo, (2015) setelah mereka melakukan penelitian, mereka menyebutkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang negatif pada belanja daerah khususnya adalah belanja modal. Rusmita, (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh daerah (PAD) tidak berpengaruh kepada belanja daerah. Hasil penelitian Panetir Bungkes, Nardisyah, (2016) memberikan kesimpulan yang sama dengan hasil penelitian Rusmita, 2016 dimana dalam penelitiannya mengatakan besarnya belanja modal tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli yang ada di setiap daerah. Nurlis, (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa DAU tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap penentuan besarnya belanja modal. Tetapi hasil penelitian Hairiyah et al., (2017) menjelaskan bahwa besarnya belanja modal dipengaruhi secara positif oleh besarnya DAU. Kemudian untuk DAK, Nurlis, (2016) dalam penelitiannya menunjukkan besarnya belanja modal dipengaruhi oleh DAK, Juniawan & Suryantini, (2018) menyimpulkan bahwa besarnya belanja modal dipengaruhi secara positif oleh DAK. Sugiyanta, (2016) dan Juniawan & Suryantini, (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan hasil yang sama mengenai keterkaitan DAK dengan besarnya belanja modal. Yusuf, (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan belanja modal tidak dipengaruhi secara signifikan oleh DAK. Adanya hasil penelitian yang bervariasi membuat peneliti termotivasi untuk mengetahui apakah PAD, DAU, & DAK berpengaruh pada besarnya penentuan belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Jensen & Meckling, (1976a) dalam teorinya yang dikenal sebagai teori keagenan membahas tentang adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dan agen merupakan hubungan keagenan dan didalam hubungan tersebut, agen bertindak untuk kepentingan prinsipal setelah itu agen akan mendapatkan imbalan tertentu dari apa yang sudah dilakukannya (Jensen & Meckling, 1976; F. Yusuf et al., 2018). Hubungan keagenan akan terjadi ketika agen diberikan wewenang untuk mengambil keputusan oleh prinsipal jika memang berada dalam kondisi yang diperlukan (Jensen & Meckling, 1976b). Permasalahan yang terjadi dalam hubungan keagenan ini terkadang menghasilkan informasi yang asimetris serta menciptakan adanya konflik kepentingan (Nurlis, 2016). Untuk menunjang penyediaan pelayanan kepada masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam hal pemenuhan pembiayaan operasionalnya maka pemerintah daerah dibantu pemerintah pusat. Kerjasama diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah salah satu contoh dari implementasi hubungan keagenan. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal memiliki beberapa potensi untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan pendapatan milik daerahnya. Potensi itu diantaranya adalah dapat berupa ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak, pembayaran retribusi, dan sebagainya. (Nurlis, 2016).

Belanja Modal

Bentuk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas operasional sehari-hari (Jalles, 2020) seperti pembiayaan pengadaan aset tetap berwujud yang umur manfaatnya panjang atau lebih dari satu periode, pengadaan fasilitas umum serta pembangunan infrastruktur daerah merupakan definisi dari komponen belanja modal. Efek

pengeluaran ini memiliki dampak yang cukup besar (Ilzetzki, 2011; Ilzetzki et al., 2011). Keuntungan dari adanya belanja modal akan menambah aset yang dimiliki oleh suatu daerah serta akan meningkatkan aktivitas belanja daerah yang bersifat rutin yang dapat dipergunakan untuk beberapa aktivitas belanja yang bersifat sebatas administrasi umum. Untuk menentukan alokasi penggunaan belanja modal maka sangat diperlukan adanya perencanaan yang baik dalam penentuannya (Dabla-Norris et al., 2011). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada didaerahnya maka sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki aset tetap.

Penambahan aset tetap dalam APBD direalisasikan dalam bentuk belanja modal (Eika et al., 2020; Prabawati & Wany, 2018). Semakin meningkat belanja modal yang dianggarkan maka akan menambah besarnya penentuan belanja modal untuk kepentingan masyarakat atau publik dalam bentuk infrastruktur ataupun sarana lainnya (Olurankinse Felix, 2012). Penggunaan belanja modal untuk kepentingan pembangunan infrastruktur daerah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi geografis yang produktif serta mobilitas penduduk yang tinggi maka kebutuhan infrastruktur merupakan kebutuhan yang tidak dapat terhindarkan lagi. Contoh belanja modal adalah belanja untuk pembelian kendaraan dinas, proyek elektrifikasi, pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan (Liang & Tussing, 2019), dan pengeluaran lainnya (Mohammed et al., 2015). Optimalisasi alokasi belanja daerah ke belanja modal menjadi hal yang sangat diperlukan karena dampak dari belanja modal ini akan berdampak pada pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemasukan yang diperoleh dari otoritas publik untuk pemerintah daerah dan berlandaskan pada peraturan serta merupakan kontribusi dari badan atau

perorangan untuk membiayai pengeluaran merupakan definisi dari pendapatan. Pendapatan ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan ini dapat berasal dari lembaga pemerintah, kegiatan penggalangan dana, iuran anggota ataupun investasi keuangan (Kwaji & Dabari, 2017). Berubahnya jumlah pendapatan akan mempengaruhi pola konsumsi (Auzina & Počs, 2010; Baker & Yannelis, 2017). Peningkatan pendapatan yang dihasilkan sendiri akan berdampak positif terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan-pendanaan yang berasal dari eksternal.

Pemerintah daerah menganggap semua penerimaan kas yang didapatkan dalam satu periode anggaran sebagai kekayaan bersih yang bertambah dan pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membayarnya kembali merupakan definisi dari Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah (PAD) (Idris, 2016). Berdasarkan teori keagenan masyarakat sebagai prinsipal mempunyai beberapa potensi dapat digunakan untuk menambah jumlah pendapatan (PAD). Pajak yang dikelola daerah, pungutan daerah, hasil pemisahan pemanfaatan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya yang dihasilkan oleh daerah merupakan contoh dari pemasukan yang diterima pemerintah daerah (Rusmita, 2016).

Kontribusi pendapatan yang dimiliki oleh daerah terhadap APBD menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat semakin sedikit sebagai pengaruh dari implementasi otonomi daerah (Rinaldi, 2013). Berbagai rencana pengeluaran daerah untuk kepentingan perolehan barang atau jasa dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. (Mohammed et al., 2015). Hubungan penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki peran yang penting bagi pembuat

kebijakan (Irandoost, 2019). Peningkatan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat (Daniel & Gao, 2015) merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan asli daerah itu sendiri (Adriani & Yasa, 2015). Fatimah *et al.*, (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan belanja daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan asli daerah. Juniawan & Suryantini, (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan besarnya belanja modal dapat dipengaruhi Pendapatan Asli milik Daerah. Purbarini & Masdjojo, (2015) juga menghasilkan kesimpulan penelitian yang sama. Berdasarkan penjelasan diatas maka, rumusan hipotesisnya yaitu:

H1: PAD mempunyai pengaruh atas Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemberian anggaran kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui mekanisme alokasi APBN bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan kemampuan di setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi. Berdasarkan Teori Keagenan, pemerintah pusat dalam hal ini bertindak sebagai prinsipal memberikan alokasi dana berupa DAU kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota. Perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal pemerintah kabupaten/kota dapat diatasi dengan memberikan DAU (Prabawati & Wany, 2018). Besarnya penentuan DAU kepada suatu daerah tidak terlepas dari adanya determinan politik (Batzilis, 2020). Pemerintah daerah dapat memakai dana transfer yang berupa DAU untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin meningkat jumlah DAU oleh pemerintah pusat untuk diberikan ke pemerintahan yang ada di setiap daerah akan berdampak kepada meningkatnya pemberian pelayanan atau pengadaan fasilitas umum melalui alokasi belanja modal (Juniawan & Suryantini, 2018). Hairiyah *et al.*, (2017) juga menyimpulkan bahwa besarnya belanja

modal dipengaruhi oleh DAU. Berdasarkan penjelasan diatas maka, rumusan hipotesisnya yaitu:

H2: DAU memiliki pengaruh pada penentuan besarnya jumlah belanja modal

Dana Alokasi Khusus (DAK)

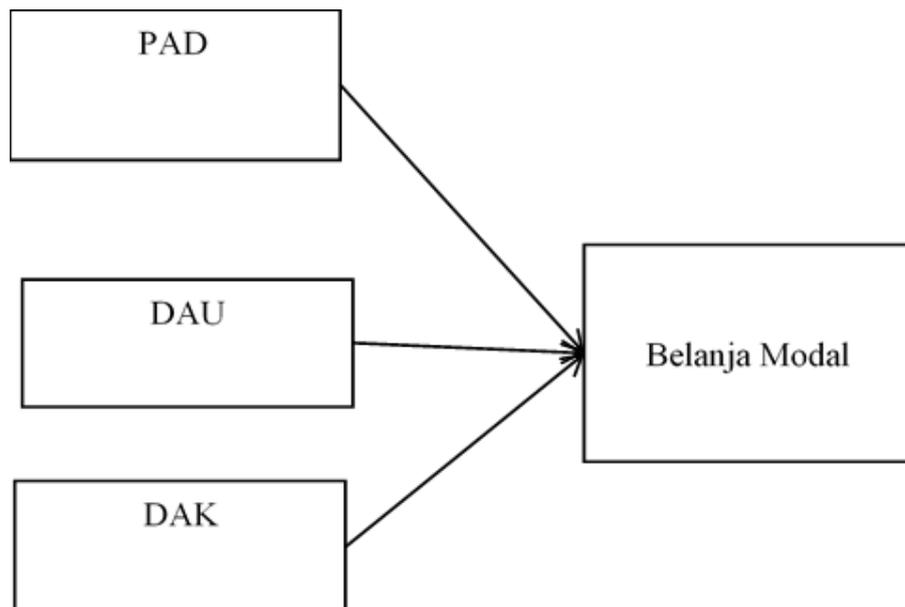
Pendanaan pemerintah pusat dan berasal dari APBN lalu kemudian disalurkan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota serta bertujuan untuk mendanai keperluan khusus daerah tertentu dan merupakan kebutuhan yang sudah menjadi prioritas nasional merupakan definisi dari Dana Alokasi Khusus (Juniawan & Suryantini, 2018). Pemberian transfer untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat merupakan bentuk jaminan atas tercapainya standar pelayanan minimum yang ada dalam suatu negara. (Juniawan & Suryantini, 2018).

Pemakaian DAK untuk membiayai beberapa aktivitas daerah memiliki sifat khusus & memiliki kesesuaian dengan kepentingan nasional (Asnawi & Ulan, 2018). Berdasarkan Teori Keagenan, pemerintah pusat sebagai prinsipal mengalokasikan anggaran DAK melalui APBN, selanjutnya DAK diberikan kepada pemerintah yang ada di setiap daerah selaku agen yang dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas publik melalui penggunaan belanja modal (Juniawan & Suryantini, 2018). Keterkaitan antara DAK dan belanja modal didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurlis, (2016) menyimpulkan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Juniawan & Suryantini, (2018) menyimpulkan bahwa DAK mempunyai pengaruh positif atas belanja modal. Penelitian Sugiyanta, (2016) serta Juniawan & Suryantini, (2018) juga menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat diambil hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: DAK memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Belanja Modal.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu langkah penting pada berapapun tingkat pendapatan (Shen et al., 2018). Beberapa sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dapat berasal dari beberapa penerimaan daerah PAD, DAU dan DAK. Meningkatnya penerimaan suatu daerah akan membuat jumlah pemberian anggaran belanja untuk modal mengalami peningkatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerahnya (Asnawi & Ulan, 2018; Konstantinou & Partheniou, 2019). Pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola berbagai sumber dana yang diperoleh untuk dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada kepentingan masyarakat terutama beberapa sektor pelayanan publik. Pembangunan jalan, saluran irigasi, pendidikan dan infrastruktur lainnya adalah salah satu contoh dari penggunaan anggaran untuk belanja modal (Buchheim & Fretz, 2020; Dissou et al., 2016). Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa yang memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Makin & Ratnasiri, 2015). Namun disisilain para peneliti meyakini bahwa pengeluaran konsumsi tidak mendukung pertumbuhan ekonomi (Wu et al., 2017). Pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam bentuk belanja modal akan lebih menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan dengan beberapa pengeluaran pemerintah lainnya (Attari & Javed, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas maka desain penelitiannya sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk jangka waktu 2011-2018 merupakan populasi dari penelitian ini. Seluruh populasi dalam penelitian ini menjadi bagian dari sampel penelitian (teknik sampel jenuh). Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun pelaporan 2011–2018. Data ini didapat dari [website https://bpkad.banyuwangikab.go.id](https://bpkad.banyuwangikab.go.id)

Variabel Dependen

Belanja Modal

Merupakan penggunaan dana untuk mendapatkan aset tetap serta mempunyai masa kegunaan > 1 tahun. Besarnya belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada LRA dari tahun 2011-2018.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemasukan yang diperoleh dari otoritas publik untuk pemerintah daerah dan berlandaskan pada peraturan serta merupakan kontribusi dari badan atau perorangan untuk membiayai pengeluaran adalah definisi dari PAD. Perhitungan PAD dapat dilakukan dengan cara

(Prabawati & Wany, 2018): PAD = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan dari Retribusi Daerah + Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + PAD lainnya yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemberian anggaran kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui mekanisme alokasi APBN bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan kemampuan di setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi. Besarnya alokasi DAU Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam LRA dari tahun 2011-2018.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan bentuk pendanaan negara dalam hal ini adalah APBN yang diperuntukkan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dan bertujuan untuk mendanai keperluan khusus daerah tertentu dan merupakan kebutuhan yang sudah menjadi prioritas nasional (Juniawan & Suryantini, 2018). Besarnya pengalokasian DAK untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran 2011-2018.

TEKNIK ANALISIS DATA

Uji Asumsi Klasik

Pengujian menggunakan program SPSS 16. Sebelum dilakukan regresi, model regresi tersebut harus menghasilkan persamaan terbaik yang tidak bias. Untuk menghasilkan *Best Linear Unbiased Estimator* maka beberapa syarat harus terpenuhi antara lain data harus normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, serta model yang dibuktikan harus linier.

Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan nilai residual yang diteliti. Pengujian normalitas menggunakan analisis *Kolmogorov – Smirnov*. Residual dikatakan normal jika *asymptotic significance* > 0,05 (alpha) atau nilai *kolmogorov – smirnov Z* ≤ Z tabel (Suliyanto, 2011)

Pengujian Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah ada hubungan diantara variabel independen. Untuk menentukannya dengan melihat nilai dari *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut adalah persamaan VIF (Suliyanto, 2011):

$$VIF = \frac{1}{TOL_j} \text{ dimana}$$

$$TOL = (1 - R_j^2)$$

Keterangan :

VIF = *variance inflation factor*

TOL = *tolerance*

R_j^2 = koefisien determinasi dari regresi antara X_j dengan *remaining regressor*

Kriteria pengujian *Variance Inflation Factor* yaitu jika :

- VIF > 10 maka menandakan adanya multikolinearitas
- VIF ≤ 10 maka menandakan tidak ada multikolinearitas.

Pengujian Autokorelasi

Pengujian menggunakan *run test*. Apabila signifikansinya > α (15%) maka tidak ada

autokorelasi pada persamaan regresi (Suliyanto, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian menggunakan Uji *Glejser*, jika besarnya probabilitasnya > nilai α (5%) maka tidak ada heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

Pengujian Linieritas

Pengujian apakah model regresi linear atau tidak maka kita dapat menggunakan uji linearitas. Pengujian linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat *print out Scatter Plot* yang dihasilkan *software SPSS for Windows*. Jika *print out* tidak membentuk suatu pola yang acak atau tidak beraturan maka model regresi adalah linear (Suliyanto, 2011).

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X1 = PAD

X2 = DAU

X3 = DAK

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi

e = residual

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian Normalitas

Hasil pengujian terletak dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

	Standardized Residual
N	8
Asymp. Sig (2-Tailed)	0.957

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis)

Pada diatas, nilai *Asymp.Sig (2 –Tailed)* sebesar 0.957. Apabila nilai *Signifikansinya* > *alpha* (5%) maka data dapat dikatakan normal (Suliyanto, 2011). Oleh karena hasil dari pengolahan data diperoleh signifikansi 0.957 > 5% sehingga data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas menggunakan *tolerance value* dan *VIF* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (constant)		
PAD	0.312	3.209
DAU	0.340	2.938
DAK	0.433	2.308

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis)

Pada Tabel 2, nilai *VIF* < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian Autokorelasi

Hasil pengujian menggunakan *Run Test* dapat dilihat di tabel 3:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig (2-Tailed)	0.703

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis)

Nilai signifikansi yang terdapat pada tabel 3 bernilai 0.703. Nilai signifikansi 0.703 > 5% maka tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menggunakan Uji *Glejser* terletak pada tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

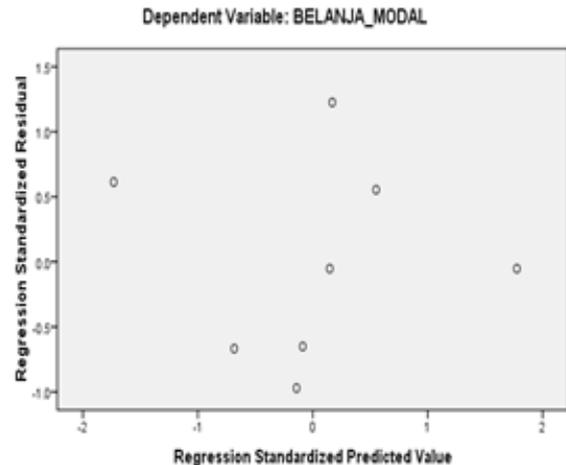
Model	t	Sig
1 (Constant)	0.629	0.564
PAD	0.747	0.496
DAU	-0.205	0.848
DAK	-1.125	0.324

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis)

Pada Tabel 4, nilai signifikansi masing-masing variabel adalah > 5% sehingga berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 4 dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Hasil Uji Linearitas dengan menggunakan melihat *print out Scatter Plot* hasil pengolahan menggunakan *software SPSS for Windows* sebagai berikut:



Gambar 2. Scatterplot Standardized Residual

Pola *Scatterplot* dari output software SPSS 16 menunjukkan plot tidak membentuk suatu pola tertentu (acak) atau dengan kata lain model regresi berbentuk linear.

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi menggunakan program SPSS. Hasil dari nilai koefisien regresi variabel-variabel independen terdapat di tabel 7:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	-6.760E11
PAD	-0.971
DAU	1.210
DAK	0.502
R	0.921
R ²	0.848
Adjusted R ²	0.734

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis)

Berdasarkan diatas, maka persamaan regresi nya adalah berikut ini:

$$Y = -6.760E11 - 0.971X_1 + 1.210X_2 + 0.502X_3$$

Dari persamaan pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa konstanta pada model regresi bernilai -6.760E11 berarti bahwa belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan bernilai - 6.760E11

persen jika variabel PAD, DAU, dan DAK bernilai nol. Nilai koefisien regresi untuk PAD (X_1) dengan tanda koefisien regresinya negatif. Hal ini menunjukkan PAD memberikan suatu pengaruh yang bersifat negatif pada belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian memberikan gambaran semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari PAD maka akan semakin memiliki pengaruh pada rendahnya belanja modal di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk koefisien regresi variabel DAU sebesar 1.210 serta memiliki tanda koefisien regresi positif. Hal tersebut menunjukkan variabel DAU memiliki pengaruh positif pada belanja modal. Artinya jika DAU mengalami peningkatan maka belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan meningkat. Nilai koefisien regresi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 0.502 dan memiliki tanda koefisien regresi positif. Berdasarkan hasil tersebut maka DAK memiliki pengaruh positif pada belanja modal. Interpretasi dari bentuk Regresi Linear Berganda meliputi beberapa hal yaitu:

Adjusted R Square

Nilai koefisien regresi yang berada di tabel nomor 7 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 73,4%. Oleh karena itu variabel belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diterangkan oleh variabel PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan 26,6 % atau 0.26 diterangkan oleh beberapa variabel diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil perhitungan uji hipotesis dapat dilihat di tabel 8.

Tabel 6. Uji Hipotesis

Model	t	Signifikansi
1 (Constant)	-1796	0.147
PAD	-2.103	0.103
DAU	3.140	0.035
DAK	1.652	0.174

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis)

PEMBAHASAN

Pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Belanja Modal

Nilai signifikansi PAD untuk Belanja modal adalah sebesar 0.103. Angka ini > 5%. Oleh karena itu berdasarkan data yang diperoleh maka PAD tidak mempunyai pengaruh atas belanja modal, dengan hasil ini maka, H_1 ditolak. Hasil penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Panetir Bungkes, Nardisyah, (2016) dan Rusmita, (2016). Dalam *Agency Theory*, hubungan keagenan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat terlihat dari kesanggupan pemerintah daerah serta tanggungjawabnya untuk melayani publik khususnya masyarakat dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian belanja modal. Bentuk dari belanja modal dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas yang sudah dianggarkan dan tertuang di anggaran belanja modal. Berdasarkan data yang tercantum di Laporan Realisasi Anggaran periode 2011 sampai dengan 2018, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan. Begitu juga dengan anggaran belanja modal. Namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 anggaran anggaran untuk belanja modal mengalami penurunan. Anggaran belanja modal di Kabupaten Banyuwangi besarnya adalah <50% dari total anggaran belanja daerah. Di tahun 2018 anggaran belanja modal berbanding dengan total belanja daerah justru mengalami penurunan sebesar 13% dari tahun 2017 (30,9%). Tingginya PAD belum tentu memiliki belanja modal yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah mayoritas pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk keperluan pembiayaan lain seperti kegiatan operasional & belanja pegawainya (Adyatma & Oktaviani, 2015). Beberapa jenis belanja daerah di Kabupaten banyuwangi antara lain belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja tidak terduga, belanja langsung. Beberapa jenis belanja daerah ini digunakan untuk menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat selaku sebagai prinsipal. Berdasarkan data realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi sejak 2011 sampai 2018 mengalami kondisi yang fluktuatif dalam hal realisasi pendapatan asli daerah namun meningkat secara signifikan pada tahun 2014. Tahun 2011 prosentase anggaran PAD dengan realisasi sebesar 106,8%, tahun 2012 sebesar 105%, tahun 2013 sebesar 106,2%, 2014 sebesar 125,9%, 2015 sebesar 114,2%, 2016 sebesar 104,2%, 2017 sebesar 85,5%, 2018 sebesar 71,5%. Tahun 2017 & 2018 menunjukkan kurangnya penerimaan daerah dari potensi yang dimiliki daerah tersebut. Seharusnya peningkatan penerimaan PAD dapat lebih ditingkatkan kembali melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sedangkan untuk realisasi belanja modal dari tahun 2011 hingga tahun 2018 tidak mencapai 100%, prosentase realisasi tertinggi untuk belanja modal hanya terjadi di tahun 2012 sejumlah 90,2% dan terendah pada tahun 2018 sejumlah 71,46%. Dengan prosentase realisasi belanja modal yang tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa kurang efektifnya pemanfaatan alokasi belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar pengeluaran pemerintah pada umumnya digunakan untuk tujuan lainnya dibandingkan digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang dapat mendukung program dan tujuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik (Erauskin & Turnovsky, 2020). Panetir Bungkes, Nardisyah, (2016) dan Rusmita, (2016) menghasilkan juga menghasilkan kesimpulan penelitian yang sama.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Angka signifikansi DAU atas belanja modal sebesar 0.035. Angka ini $< 5\%$. Sehingga DAU berpengaruh pada belanja modal. Dalam *Agency Theory*, pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen dari prinsipal untuk melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan mereka (Adyatma & Oktaviani, 2015). Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran 2011 sampai dengan 2018, DAU yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk membantu keuangan pemerintah daerah demi terlaksananya desentralisasi dengan mengalokasikan belanja modalnya. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan, namun tahun 2017 & tahun 2018 terjadi penurunan anggaran.

Tahun 2011 DAU mencapai Rp 815.156.284.000, Tahun 2012 sebesar Rp1.030.217.037.000, tahun 2013 mencapai Rp1.154.495.171.000, tahun 2014 mencapai Rp1.254.496.229.000, tahun 2015 mencapai Rp1.288.940.680.000, tahun 2016 mencapai Rp1.400.384.500.000, tahun 2017 mencapai Rp1.375.784.247.000, tahun 2018 sebesar Rp1.375.784.247.000. Keberadaan DAU dari pemerintah pusat sangat diperlukan pemerintah daerah untuk kepentingan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik terutama dalam peningkatan fasilitas publik serta fasilitas infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah. Meningkatnya DAU yang diperoleh maka akan berdampak kepada semakin meningkatnya alokasi pemerintah daerah untuk belanja modalnya (Prabawati & Wany, 2018). Hal ini terlihat dari adanya peningkatan anggaran belanja modal untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tetapi DAU cenderung menurun pada tahun 2017-2018. Tahun

2011 anggaran belanja modal sebesar Rp 322.301.313.850, tahun 2012 sebesar Rp 394.184.796.453, tahun 2013 sebesar Rp 474.784.457.818, tahun 2014 sebesar Rp 648.519.714.340, tahun 2015 sebesar Rp 808.236.823.526, tahun 2016 sebesar Rp 1.001.136.525.530, tahun 2017 sebesar Rp 809.457.377.748, dan tahun 2018 sebesar Rp 544.412.189.746. Kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu daerah di beberapa tingkatan pemerintahan ditentukan oleh kebutuhan fiskal masing-masing tingkatan pemerintahan daerah atau dengan kata lain tujuan dari DAU adalah untuk mengantisipasi adanya kondisi dimana kebutuhan daerah melebihi potensi jumlah penerimaan yang ada di daerah tersebut (Adyatma & Oktaviani, 2015). Hairiyah et al., (2017) juga menghasilkan kesimpulan yang sama.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Angka signifikansi DAK terhadap belanja modal sebesar 0.174. Angka ini $> 5\%$. Sehingga DAK tidak mempunyai pengaruh pada Belanja Modal. Dalam *Agency Theory*, agen diminta oleh prinsipal untuk melakukan aktivitas atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal melalui pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Adyatma & Oktaviani, 2015). DAK yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari Pemerintah Pusat berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, realisasi penggunaan anggaran DAK mengalami penurunan sejak tahun 2015. Tahun 2011 sampai dengan 2013 prosentasi anggaran dengan realisasi mencapai 100% namun tahun 2014 realisasi hanya 75% dari total anggaran sebesar Rp 64.053.640.000 atau hanya Rp 48.040.230.000 DAK yang terealisasi di tahun 2014, tahun 2015 dari anggaran sebesar Rp 141.830.300.000 hanya terealisasi sebesar Rp 126.464.240.000 atau hanya 89,17% saja, tahun 2016 anggaran DAK mencapai Rp

663.155.797.900 namun hanya Rp 357.337.495.217 atau hanya 53,88% saja, tahun 2017 anggaran DAK mencapai Rp 400.488.612.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 344.849.911.663 atau 86,11%, dan anggaran DAK di tahun 2018 mencapai Rp 442.593.443.000 dan realisasinya hampir 100% atau sekitar 95,74% (Rp 423.717.990.705). Penggunaan DAK pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 realisasi DAK tidak mencapai 100% selain itu kebutuhan untuk belanja modal pemerintah kabupaten sebagian besar sudah dipenuhi dengan menggunakan DAU dan hal ini dapat dilihat dari terealisasinya anggaran yang sudah ditetapkan di setiap tahunnya (Asnawi & Ulan, 2018). Yusuf, (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan hasil yang sama bahwa belanja modal tidak dipengaruhi oleh DAK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak dipengaruhi oleh PAD dan DAK. Sedangkan untuk Dana alokasi yang bersifat umum mempunyai pengaruh pada Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penggunaan belanja modal masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat yang di kemas dalam bentuk pemberian DAU. Oleh karena itu hubungan keagenan yang baik harus terjaga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi kelancaran proses desentralisasi berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus lebih mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menggerakkan perekonomian yang berada di daerahnya dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki salah satunya adalah *natural capital*. Pemanfaatan *natural capital* dengan tetap memperhatikan lingkungan

(Zasada et al., 2018). Dengan demikian peningkatan pelayanan kepada publik dapat tercapai tanpa bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya meneliti di satu objek saja dengan rentang waktu atau periode selama 8 tahun sehingga untuk topik penelitian selanjutnya dapat meneliti ruang lingkup yang lebih luas dan lebih lama rentang waktu objek yang diteliti. Selain itu masih terdapat 26,6 % variabel lainnya yang dapat diteliti oleh penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Adriani, N., & Yasa, I. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(11), 1328–1356.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Asnawi & Ulan, S. U. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM(DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA. *Jurnal Education and Economics (JEE)*, 1(4), 438–449.
- Attari, M. I. J., & Javed, A. Y. (2013). Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010. *Procedia Economics and Finance*, 5(13), 58–67. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00010-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00010-5)
- Auzina, A., & Počs, R. (2010). *Impact of income changes on private consumption expenditure and its structure*. July, 579–585. <https://doi.org/10.3846/bm.2010.077>
- Baihaqi, & Khotimah, H. (2009). Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota. 7(3), 1–27.
- Baker, S. R., & Yannelis, C. (2017). Income changes and consumption: Evidence from the 2013 federal government shutdown. *Review of Economic Dynamics*, 23, 99–124. <https://doi.org/10.1016/j.red.2016.09.005>
- Batzilis, D. (2020). The political determinants of government spending allocation and growth. *Research in Economics*, 74(3), 213–220. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2020.07.001>
- Behera, D. K., & Dash, U. (2019). Prioritization of government expenditure on health in India: A fiscal space perspective. *Socio-Economic Planning Sciences*, 68(October 2018), 100667. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2018.11.004>
- Buchheim, L., & Fretz, S. (2020). Parties, divided government, and infrastructure expenditures: Evidence from U.S. states. *European Journal of Political Economy*, 61(September 2019), 101817. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.101817>
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic

- growth. *World Development*, 127, 104742.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills, Z., Papageorgiou, C., Berg, A., Bredenkamp, H., Collier, P., Deverajan, S., Desruelle, D., Guerguil, M., Gupta, S., Hausmann, R., Kim, D., Knack, S., Kraay, A., Pritchett, L., Radifer, L., Zanna, F., ... Pierre, J. (2011). Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency; IMF Working Paper 11/37; February 1,. *IMF Working Papers*.
- Daniel, B. C., & Gao, S. (2015). Implications of productive government spending for fiscal policy. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 55, 148–175.
<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2015.04.004>
- Dissou, Y., Didic, S., & Yakautsava, T. (2016). Government spending on education, human capital accumulation, and growth. *Economic Modelling*, 58, 9–21.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.04.015>
- Eika, L., Mogstad, M., & Vestad, O. L. (2020). What can we learn about household consumption expenditure from data on income and assets? *Journal of Public Economics*, 189, 104163.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104163>
- Erauskin, I., & Turnovsky, S. J. (2020). Financial globalization and its consequences for productive government expenditure. *Journal of Macroeconomics*, 66(August).
<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103244>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197.
<https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91.
<https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>
- Idris, I. F. (2016). Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. *European Journal of Accounting, Auditing And Finance Research*, Vol.4 No.1(1), 28–42.
- Ilzetzki, E. (2011). *Fiscal Policy and Debt Dynamics in Developing Countries*. May.
<http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/1813-9450-5666>
- Ilzetzki, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2011). *How Big (Small?) are Fiscal Multipliers?* by Ethan Ilzetzki, Enrique G. Mendoza and Carlos A. Végh; *IMF Working Paper 11/52; March 1, 2011*. 66.
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Big-Small-are-Fiscal-Multipliers-24699>
- Irاندoust, M. (2019). Wagner on government spending and national income: A new look at an old relationship. *Journal of Policy Modeling*, 41(4), 636–646.
<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.02.003>
- Jalles, J. T. (2020). Dynamics of government spending cyclicality. *Economic Modelling*, February.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.04.010>
- Jensen & Meckling. (1976a). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jensen & Meckling. (1976b). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership

- Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 1976, 305–360.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10916>
- Ke, X., Lin, J. Y., Fu, C., & Wang, Y. (2020). Transport infrastructure development and economic growth in China: Recent evidence from dynamic panel system-GMM analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145618>
- Konstantinou, P. T., & Partheniou, A. (2019). The Effects of Government Spending Over the Business Cycle: A Disaggregated Analysis for OECD and Non-OECD Countries. *Quarterly Review of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.09.017>
- Kwaji, S. F., & Dabari, I. J. (2017). EMPIRICAL ANALYSIS OF TAX REVENUE COLLECTION BY THE FEDERAL GOVERNMENT IN NIGERIA. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 5(2), 1–11.
- Liang, L. L., & Tussing, A. D. (2019). The cyclical of government health expenditure and its effects on population health. *Health Policy*, 123(1), 96–103. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.11.004>
- Mabillard, V., & Pasquier, M. (2015). *Transparency and Trust in Government: A Two-Way Relationship*. November 2018. <https://doi.org/10.5334/ssas.78>
- Makin, A. J., & Ratnasiri, S. (2015). Competitiveness and government expenditure: The Australian example. *Economic Modelling*, 49, 154–161. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.04.003>
- Mohammed, A., Ahmed, B. B., & Salihu, A. M. (2015). Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts Science & Commerce*, 6(3), 67–77.
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(1), 107–113.
- Olanubi, S. O., & Osode, O. E. (2017). The efficiency of government spending on health: A comparison of different administrations in Nigeria. *Journal of Policy Modeling*, 39(1), 79–98. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2016.12.002>
- Olurankinse Felix. (2012). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government

- system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.5897/jat11.038>
- Pan, X., Li, M., Guo, S., & Pu, C. (2020). Research on the competitive effect of local government's environmental expenditure in China. *Science of the Total Environment*, 718, 137238. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137238>
- Panetir Bungkes, Nardisyah, S. A. (2016). PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN SENDIRI DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 5(3), 50–59.
- Prabawati, P. S. S., & Wany, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.30742/equilibriumm.v0i0.414>
- Purbarini, E., & Masdjojo, G. N. (2015). Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(1), 75. <https://doi.org/10.23917/jep.v16i1.939>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. [blob:https://online-journal.unja.ac.id/b3066ec5-8984-4adf-8545-5ce59b4a70c4](https://online-journal.unja.ac.id/b3066ec5-8984-4adf-8545-5ce59b4a70c4)
- Qiao, M., Ding, S., & Liu, Y. (2019). Fiscal decentralization and government size: The role of democracy. *European Journal of Political Economy*, 59(April), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.04.002>
- Rinaldi, U. (2013). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(22), 105–113. <https://core.ac.uk/download/pdf/11718149.pdf>
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>
- Shen, W., Yang, S. C. S., & Zanna, L. F. (2018). Government spending effects in low-income countries. *Journal of Development Economics*, 133(November 2015), 201–219. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.02.005>
- Sugiyanta, S. (2016). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504>
- Suliyanto. (2011). *EKONOMETRIKA TERAPAN: Teori & Aplikasi dengan SPSS* (S. Suyantoro (ed.)). Penerbit ANDI.

- Wang, C., Zhang, X., Ghadimi, P., Liu, Q., Lim, M. K., & Stanley, H. E. (2019). The impact of regional financial development on economic growth in Beijing–Tianjin–Hebei region: A spatial econometric analysis. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 521, 635–648. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.01.103>
- Wu, S., Li, B., Nie, Q., & Chen, C. (2017). Government expenditure, corruption and total factor productivity. *Journal of Cleaner Production*, 168, 279–289. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.043>
- Yusuf, F., Yousaf, A., & Saeed, A. (2018). Rethinking agency theory in developing countries: A case study of Pakistan. *Accounting Forum*, 42(4), 281–292. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.10.002>
- Yusuf, M. H. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Zasada, I., Weltin, M., Reutter, M., Verburg, P. H., & Piorr, A. (2018). EU's rural development policy at the regional level—Are expenditures for natural capital linked with territorial needs? *Land Use Policy*, 77(January), 344–353. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.053>
- Zen, M. H., & Wulandari, D. (2016). Development Strategy of The Tourism Industry in Banyuwangi Regency (Case Study: Natural Park Ijen Crater Banyuwangi). *IOSR Journal of Business and Management*, 18(08), 41–47. <https://doi.org/10.9790/487x-1808014147>
- Zhang, J., Qu, Y., Zhang, Y., Li, X., & Miao, X. (2019). Effects of FDI on the Efficiency of Government Expenditure on Environmental Protection Under Fiscal Decentralization.pdf. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 2496.